BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Semakin berkembangnya perkembangan di dunia pada saat ini,membuat Indonesia harus berusaha keras memajukan pula perekonomiannya dan mengikuti perkembangan jaman agar dapat bersaing dengan negara-negaralainnya. Dengan tuntutan seperti ini, maka Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya akan menghadapi permasalahan yang penting, yaitu bagaimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif yang dapat menarik minat investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi dan mampu menciptakan lapangankerja sebanyak-banyaknya. Sejak dikeluarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 Pajak bila dilihat darisegi pemungutannya dibedakan antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusatadalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenagan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dantujuh jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah provinsi tersebut terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor danKendaraan di Atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (AP dan ABT). Serta pajak daerah kabupaten meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

. Berdasarkan jenis Pajak Daerah di atas, yang menjadi pembahasan adalah Pajak Hiburan, dimana pajak hiburan sangat potensial dalam meningkatan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Kabupaten mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan. Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah tentunya mendapat permasalahan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Hiburan ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga

dapat membiayai pembangunan daerah. Banyaknya tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengelola Pajak Hiburan ini tentunya bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena itu mahasiswa merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tangerang dalam mengelola Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang. Hal inilah yang menjadikan penulis memilih Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagai tempat praktek, dan **"PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG".** sebagai objek yang menarik untuk dijadikan wadah Kuliah Kerja Praktek.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui:

1. Prosedur Pemungutan Pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Hambatan dalam prosedur pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
3. Upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan prosedur pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pemdapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui masalah pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hiburan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tangerang.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Mebuktikan kembali teori-teori dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak hiburan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisis factor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Oleh karena itu metode yang diterapkan oleh penulis dalam laporan kerja praktek ini adalah menggunakan *Metode deskriptif* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan melaporkan suatu kejadian atau peristiwa pada waktu peneliti mengadakan penilitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Teknik Wawancara (Interview)

   Penulis melakukan Tanya jawab secara langsung kepada karyawan (nara sumber) tentang hal-hal yang berhubungan dengan operasional kerja dimana penulis ditempatkan.

2. Pengamatan langsung (observasi)

   Penulisan mengamati dan mempelajari secara langsung dilapangan mengenai aturan-aturan prosedur pemungutan pajak hiburan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

3. Studi pustaka

   Penulis mencari literature yang berhubungan dengan topik laporan seperti buku-buku perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan ini adalah metode *block realease* yaitu suatu metode pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan dalam satu periode tertentu, dimana periode tersebut dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih tiga minggu yaitu dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 02 Agustus 2013.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan *(Field Research),* yaitu penelitian secara langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang dilakukan dengan cara :
   a. Pengamatan (*Observation*)

      Yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis dalam hal ini penulis melihat dan mengamati secara langsung apa yang terjadi dan kaitannya dalam laporan kerja praktek ini.
   b. Wawancara (*Interview)*

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pimpinan maupun karyawan perusahaan yang berhubungan dengan kajian yang diteliti.
   c. Dokumentasi

      Pengumpulan, pemilihan dan pengolahan bukti-bukti serta data-data yang berhubungan dengan bidang kajian laporan Kerja Praktek yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

   Yaitu bentuk penelitian dengan cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan diklat-diklat yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Dinas Pendapatan Daerah Kab Tangerang, Komp Perkantoran Tigaraksa Gedung Usaha – Usaha Daerah.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek selama 3 minggu, dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012. Kerja Praktek dimulai dari hari Senin sampai hari Jum'at, pukul 08.00 s.d 15.00.

Tabel 1

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahun 2013

No.	Kegiatan Kerja Praktek	Bulan						
		Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
I	Persiapan Kerja Praktek							
	1. Permohonan Ijin Kerja Praktek	■						
	2. Realisasi Ijin Kerja Praktek	■						
	3. Penentuan Tempat Kerja Praktek	■						
	4. Surat Penerimaan dari Instansi	■						
II	Pelaksanaan Kerja Praktek							
	1. Aktivitas Kerja Praktek		■	■				
	2. Bimbingan Kerja Praktek dengan Pembimbing Perusahaan		■	■	■	■		
III	Pelaporan Kerja Praktek							
	1. Konsultasi dengan Dosen Kerja Praktek				■	■		
	2. Bimbingan dengan Dosen Kerja Praktek				■	■		
	3. Pembuatan Laporan Kerja Praktek				■	■		
	4. Final Laporan Kerja Praktek						■	■
	5. Pengumpulan Laporan Kerja Praktek						■	■